

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam wilayah atau negara pasti bertujuan mengenai kesejahteraan rakyat. Dalam hal itu pemerintah memfokuskan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut dengan memusatkan pada aspek Pembangunan ke daerah yang sebagian besar penduduknya memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Semua Pembangunan dilakukan terus menerus sesuai dengan prioritas kebutuhan sebuah daerah yang menjadi ketetapan melalui sebuah program Pembangunan (Firda Aulia, 2022)

Upaya mencapai maksud dari Pembangunan pemerintah Indonesia sedang melakukan serangkaian program guna untuk pembangunan berkelanjutan atau di seluruh wilayah Indonesia. Yang meliputi tingkat nasional hingga desa. Hal itu merupakan wujud rasa peduli dan cinta terhadap kesejahteraan rakyat. Penerapan *sustainable development goals* (SDGs) dimulai pada 2015 hingga 2030. SDGs adalah program lanjutan *Millenium Development Goals* (MDGs) (Firda Aulia, 2022)

Terdapat 8 tujuan yang diharapkan dapat diraih pada 2015. Tujuannya yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Target yang ada adalah sebuah tantangan global yang diuraikan didalam Deklarasi Milenium. Lebih dari 189 negara, termasuk Indonesia, mengadopsi dan menandatangani deklarasi ini saat KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Millenium di New York yang diselenggarakan pada September tahun 2000 (Noviyanto, 2020).

Selama perjalanan menuju pencapaian target MDGs, setiap negara memiliki hambatan dan dinilai bahwa MDGs masih jauh dari harapan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa kekurangan dalam implementasi MDGs, antara lain: (1) Target dan sasaran yang terlalu minim: Target MDGs hanya mengupayakan pengurangan separuh dari tingkat kemiskinan. Target ini dianggap terlalu rendah karena banyak negara telah mencapai tingkat kemiskinan yang lebih baik sebelumnya. (2) Persepsi yang membedakan negara miskin dan negara maju: MDGs mengasumsikan bahwa negara miskin dan berkembang memiliki tanggung jawab besar dalam menggapai tujuan, sementara negara maju hanya memberikan dukungan finansial. (3) Proses pembuatan dokumen MDGs yang kurang melibatkan partisipasi (4) Fokus pada gejala kemiskinan: Tujuan MDGs hanyab berfokus pada kemiskinan, sedangkan masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak mendapatkan prioritas. Selain itu, masalah terkait pajak dan pembiayaan pembangunan juga kurang diperhatikan. (Pustaka, 2021).

Sidang Umum yang diselenggarakan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di New York pada waktu 26 September 2015, secara SAH Program MDGs dinyatakan sudah berakhir dan menyepakati serta melanjutkan MDGs dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) periode 15 tahun kedepan. SDGs meliputi tujuh belas tujuan dan 169 Target yang diharapkan mampu direalisasikan tepat pada 2030. SDGs yang telah dibentuk berlaku untuk semua negara, meliputi negara maju dan berkembang yang mempunyai tanggung jawab moral untuk dalam menggapai tujuan maupun target SDGs tersebut. (Diskominfo Ngawi, 2021).

Target serta tujuan SDGs tercermin dalam tiga pilar yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Tujuan dan Target SDG's ada 17 yakni:

Table 1.1 Tabel SDG's

No	Tujuan
1.	Tanpa Kemiskinan
2.	Tanpa Kelaparan
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4.	Pendidikan Berkualitas
5.	Kesetaraan Gender
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak
7.	Energi Bersih dan Terjangkau
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10.	Berkurangnya Kesenjangan
11.	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13.	Penanganan Perubahan Iklim
14.	Ekosistem Lautan
15.	Ekosistem Daratan
16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sumber : (United Nations, 2024)

Tujuan utama yang ditekankan oleh SDGs adalah "*No Poverty*" atau "menghilangkan kemiskinan". Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang multidimensional yang dampaknya dapat menciptakan masalah-masalah lainnya. Karena kemiskinan dapat menyebabkan munculnya masalah sosial baru dalam

kehidupan, maka kajian tentang kemiskinan sering disebut sebagai "kajian abadi" yang terus-menerus dan perlu dicari solusinya. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana kehidupan Masyarakat/penduduk dirasa tidak mampu untuk memperoleh sumber daya yang bisa dikatakan cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum dan mereka yang kehidupannya di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut. Nilai dari sebuah kebutuhan dasar minimum tersebut digambarkan melalui garis kemiskinan (Hidayat, 2020).

Kemiskinan sangat berkaitan dengan kerentanan. Kerentanan menurut Kementrian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia adalah keadaan yang menimbulkan sebuah akibat ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang terhadap sebuah ancaman yang terjadi. Kerentanan adalah keadaan di mana sebuah masyarakat atau komunitas rentan mengalami penurunan ketahanan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mengancam kehidupan manusia.(Mantika, N. J., Hidayati, S. R., & Fathurrohmah, 2020).

Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan mencakup individu-individu yang merasakan kendala dan mengalami suatu kondisi yang terbatas dalam memperoleh standar sebuah kehidupan yang baik dan layak. Kelompok rentan memiliki hak untuk menerima perlakuan khusus guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap individu yang masuk ke dalam kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori rentan memiliki hak untuk menerima perlakuan dan perlindungan tambahan. Kelompok rentan ini

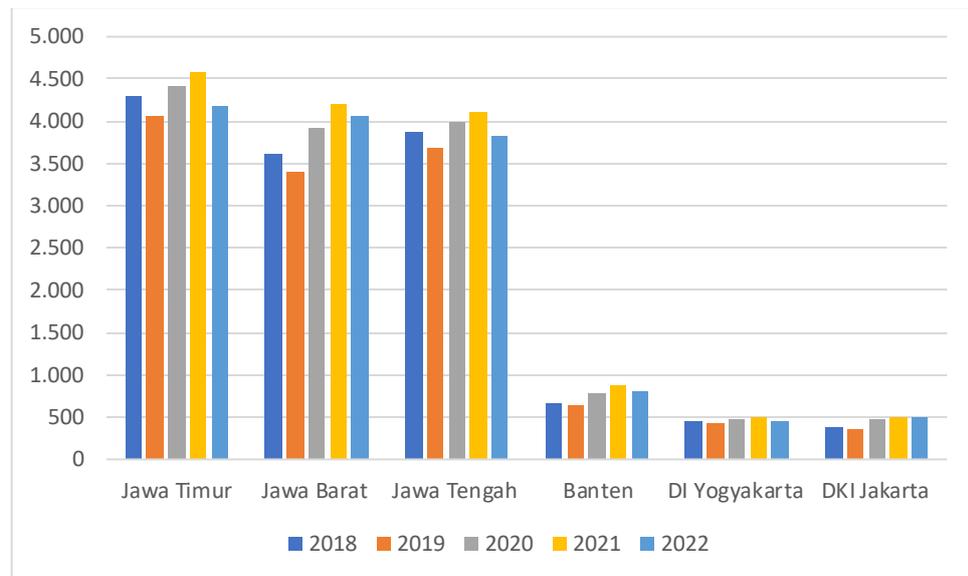
mencakup orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. (Humaedi et al., 2021)

Kelompok rentan timbul akibat terbatasnya aset dan akses yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pembatasan fisik dapat terjadi karena kurangnya fungsi anggota tubuh, baik disebabkan oleh kecelakaan maupun kondisi bawaan seperti pada individu dengan disabilitas. Sedangkan pembatasan non-fisik mencakup kekurangan kepemilikan seperti tanah, harta, atau tempat tinggal, yang sering dialami oleh masyarakat miskin. Keterbatasan akses dapat muncul karena ada pihak yang menghalangi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini bisa disebabkan oleh disorganisasi yang meningkatkan risiko konflik, atau karena wilayah tempat tinggalnya rentan terhadap bencana alam. (Humaedi et al., 2021)

Kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan, tidak hanya dalam menyebabkan masalah sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi sebuah negara. Apabila Tingkat kemiskinan pada suatu negara cukup tinggi berakibat pada peningkatan biaya yang diperlukan dalam menjalankan sebuah pembangunan ekonomi, dan akhirnya menjadi hambatan dalam proses kemajuan ekonomi. Pulau Jawa sebagai pusat kekuatan ekonomi di Indonesia, didukung oleh kelimpahan sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, perairan, serta sumber daya manusia dan keahlian dalam pengolahan. Faktor-faktor ini menjadi dorongan utama bagi pembangunan di Pulau Jawa dan berpotensi menciptakan kesejahteraan tidak hanya bagi penduduk daerah saja, namun bagi seluruh bangsa. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang kuat, perhatian terhadap

penanggulangan kemiskinan di Pulau Jawa menjadi penting mengingat adanya tren peningkatan kemiskinan dari tahun ke tahun (Dhea Cahya Nilam Triana Dewi, 2022)

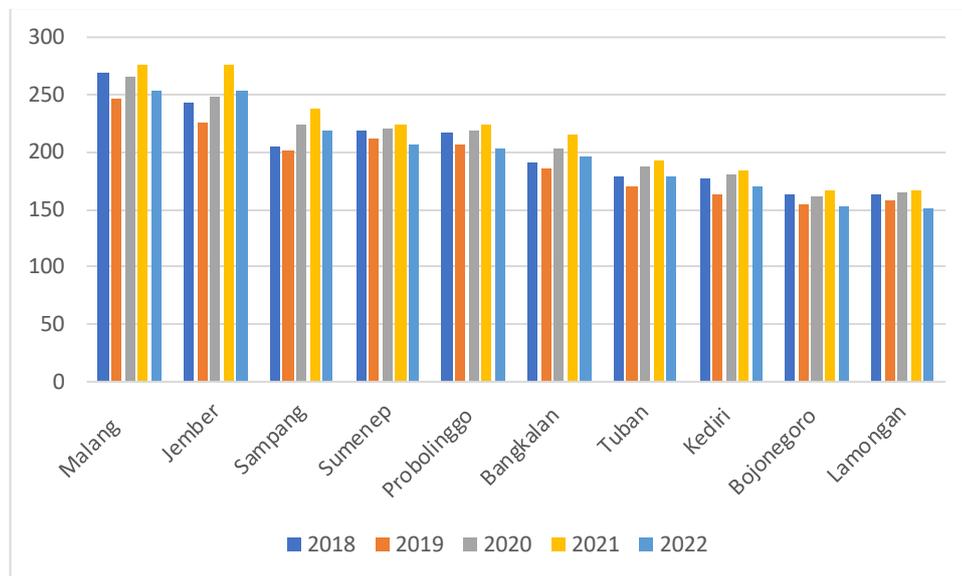
Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah Peneliti 2024

Gambar Grafik 1.1 di atas, Jumlah penduduk miskin Jawa Timur berada di urutan pertama. Lalu diurutkan kedua terdapat provinsi Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Jumlah penduduk Miskin di Jawa Timur terus terjadi sebuah peningkatan seiring waktu di tahun 2018-2022. Di tahun 2018 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur menyentuh angka 4.292 ribu Jiwa. Di tahun 2019 sempat turun di angka 4.056 Ribu Jiwa. Lalu di tahun 2020 naik karena adanya pandemi menjadi 4.19 Ribu Jiwa dan ditahun 2021 naik menjadi 4.573 Ribu Jiwa. Dan ditahun 2022 mampu menekan angka jumlah penduduk miskin menjadi 4.181 Ribu Jiwa. Tentunya semua itu disertai dengan usaha berbagai pihak.

Gambar 1. 2 10 Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Miskin tertinggi di Jawa Timur (Ribuan Jiwa) 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah Peneliti 2024

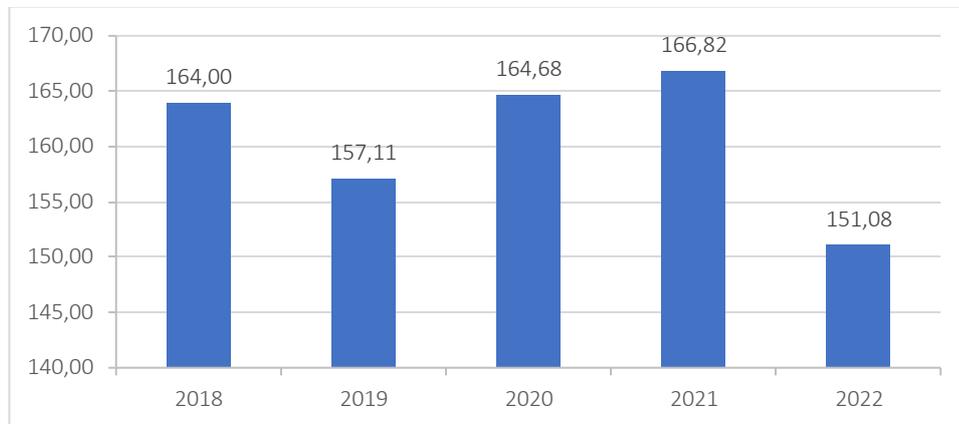
Pada tanggal 4 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menginformasikan perintah untuk menindaklanjuti dengan cepat penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tingkat \$1,9 PPP hingga mencapai 0% tahun 2024. Target ini diusulkan agar tercapai enam tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2022). Dalam rangka menjalankan program pengurangan kemiskinan ekstrem, pemerintah berfokus merealisasikan tahap I yang direncanakan dilakukan sebelum akhir tahun 2021. Fokus program ini adalah tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota utama meliputi 20% populasi miskin ekstrem yang memiliki persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2022)

Kelima kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan, dipilih sebagai pilot project atau sebagai kabupaten/kota percontohan program nasional untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Total jumlah penduduk miskin ekstrem di kelima kabupaten tersebut yakni mencapai 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sejumlah 265.180 rumah tangga. Kabupaten Lamongan masuk dalam 5 kabupaten prioritas kemiskinan ekstrem karena memiliki tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 7,37% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 87.620 jiwa (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2021).

Perlu diperhatikan bahwa penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrem itu berbeda. Perbedaan itu ditinjau sisi pengeluaran harian dan bulanan. Penduduk miskin ekstrem, pengeluaran harian hanya sebesar Rp 10.739 dan pengeluaran bulanan hanya Rp 322.170. Sementara itu, penduduk miskin biasa memiliki pengeluaran harian sebesar Rp 15.750 dan pengeluaran bulanan sebesar Rp 472.525.

Penduduk miskin ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang tingkat kesejahteraannya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem setara \$1.9 PPP. Penentuan garis kemiskinan ekstrem ini telah disepakati oleh anggota PBB dan pengukurannya memakai metode pengukuran kemiskinan absolut yang konsisten di antara negara-negara dan sepanjang waktu oleh Bank Dunia. Dengan demikian, penduduk miskin ekstrem termasuk dalam kategori penduduk miskin sebab berada pada posisi di bawah garis kemiskinan nasional yang sudah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Lamongan 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah Penulis 2024

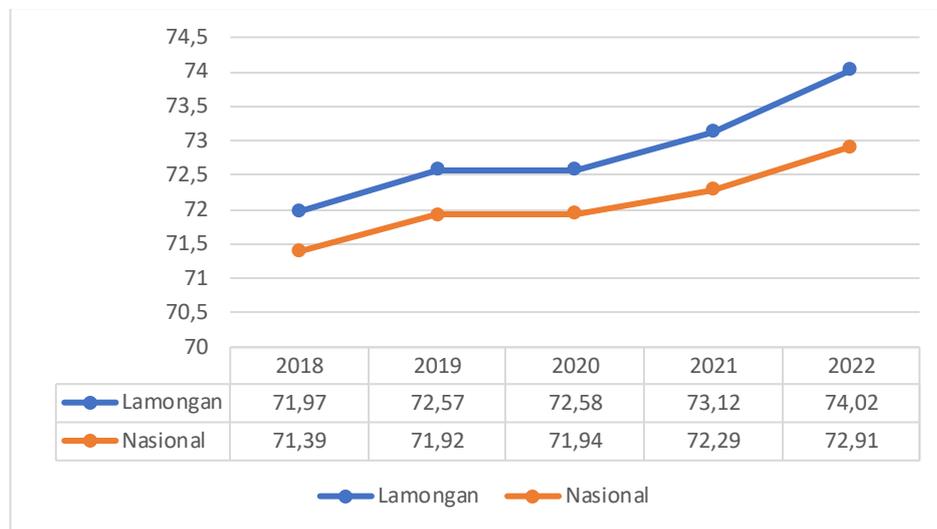
Jumlah penduduk miskin di kabupaten lamongan tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif. Di tahun 2018 jumlah penduduk miskin yakni 164,00 lalu turun menjadi 157,11. Pada tahun 2020, Kembali naik karena Covid-19 menjadi 164,68 dan terus naik di tahun 2021 menjadi 166,82. Di tahun 2021 kabupaten Lamongan termasuk dalam 5 kabupaten kemiskinan ekstrem. Namun di tahun 2022 kabupaten lamongan berhasil menekan jumlah penduduk miskin di angka 151,08. Akan tetapi Kabupaten Lamongan masih masuk ke dalam sebaran 212 kabupaten/kota wilayah prioritas kemiskinan ekstrem di 2022.

Penyebab Sebuah Kemiskinan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Nurkse 1953 yakni teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori lingkaran kemiskinan Nurkse 1953 dikatakan bahwa jika kemiskinan berkelanjutan disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbelakangan, ketertinggalan dalam sumber daya manusia yang bisa dilihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal. Keterbelakangan dan ketertinggalan SDM mengakibatkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah akan berdampak pada pendapatan yang rendah (ditunjukkan oleh

Pendapatan Perkapita) dan Pendapatan yang rendah akan berimbas pada tabungan dan investasi yang rendah. Kurangnya investasi mengakibatkan akumulasi modal yang rendah, sehingga lapangan kerja menjadi terbatas (ditunjukkan oleh besarnya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal merupakan dampak dari keterbelakangan yang berlanjut, dan demikian seterusnya. (Fanny Cantika Roseline, 2022)

Kemiskinan disebabkan oleh kualitas dari sumber daya manusia yang bisa dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut pandangan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), pembangunan manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kesempatan individu dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan penghasilan. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdampak pada penurunan produktivitas kerja penduduk. Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan yang minim. Hal ini berujung pada peningkatan jumlah penduduk karena pendapatan yang rendah (Aisyah et al., 2023)

Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Lamongan dan Nasional 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah Peneliti 2024

Berdasarkan grafik 1.4 diketahui IPM di Kabupaten Lamongan terjadi kenaikan tahun 2018-2022. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan kualitas lebih baik. Peningkatan ini tidak lepas dari beberapa komponen IPM seperti usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita setiap individu. Peningkatan IPM yang terlihat melalui grafik tersebut menunjukkan jika pembangunan manusia merupakan prioritas yang perlu diperhatikan dan dipantau di Kabupaten Lamongan.

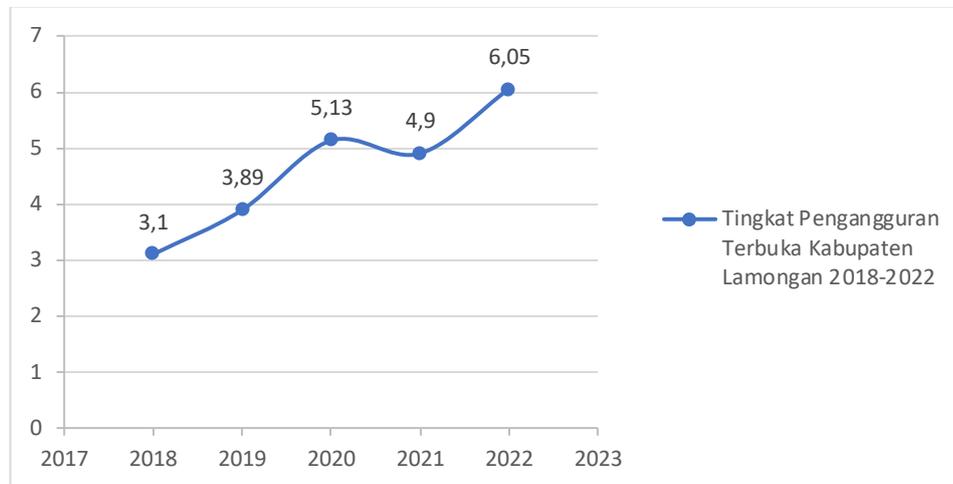
Kabupaten Lamongan memiliki status IPM tinggi, bahkan perkembangan IPM di Kabupaten Lamongan melebihi rata-rata nasional. Namun, fenomena yang terjadi di Kabupaten Lamongan adalah angka IPM yang terus meningkat setiap tahunnya tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini menjadi

sesuatu yang tidak wajar, mengingat adanya modal pembangunan manusia yang tinggi dan berkualitas seharusnya dapat mengurangi angka penduduk miskin.

Tingkat Pengangguran juga berkontribusi pada tingginya jumlah penduduk miskin disuatu wilayah. Permasalahan pengangguran semakin menjadi serius karena pertumbuhan penduduk yang cepat dan jumlahnya yang besar. Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan tenaga kerja melebihi pertumbuhan lapangan kerja yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi baru. Dalam ilmu kependudukan, individu yang aktif mencari pekerjaan termasuk dalam kategori angkatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada individu yang berumur 15 hingga 64 tahun yang sedang bekerja atau sedang dalam proses mencari pekerjaan. Oleh karena itu, jika seseorang dalam angkatan kerja tidak bekerja, ia dianggap sebagai pengangguran (Dini et al., 2023)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran bisa disebabkan oleh penambahan jumlah angkatan kerja setiap tahun, sementara tenaga kerja yang tidak terserap terus mengalami peningkatan. Masalah pengangguran semakin menjadi-jadi akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan jumlah yang sangat besar. Tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah mencerminkan kondisi tenaga kerja di wilayah tersebut. (Dini et al., 2023).

Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamongan 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah Peneliti 2024

Pada Gambar grafik 1.5 diketahui bahwa Tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka diketahui sebanyak 3,1%. Lalu ditahun 2019 naik menjadi 3,9% dan ditahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 membuat pengangguran terbuka naik lagi sampai 5,13%. Di tahun berikutnya sempat turun di angka 4,95 akan tetapi Kembali naik lagi bahkan di angka 6,05%.

Tingginya tingkat pengangguran biasanya dipengaruhi karena pertumbuhan lapangan pekerjaan yang terbatas atau persyaratan penerimaan pekerjaan yang tinggi. Di era saat ini, beberapa perusahaan banyak membuka lowongan dengan syarat minimal menempuh pendidikan diploma atau sarjana. Kondisi tersebut menyebabkan penduduk yang tidak mampu bersaing tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Faktor lain yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Lamongan adalah pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi.

Urgensi dari penelitian ini adalah kemiskinan di Lamongan termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem dan menjadi kabupaten prioritas dalam pengentasan

kemiskinan ekstrem 2021-2024. Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan mendapatkan kategori tinggi dalam skor IPM akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan penurunan kemiskinan. Seharusnya jika IPM tinggi berarti Kabupaten Lamongan sudah memiliki modal manusia yang berkualitas sehingga mampu menekan angka kemiskinan. Namun, Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lamongan cenderung naik di setiap tahun. Oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah benar variable diatas benar benar mempengaruhi Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan. Sehingga penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Lamongan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan berikut ini:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lamongan?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lamongan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lamongan

### 1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lamongan. Sebuah kabupaten atau kota jika memiliki kemiskinan yang cukup tinggi perlu adanya penanganan yang tepat agar dapat diatasi. Tingginya kemiskinan tersebut dikarenakan adanya beberapa factor yang mempengaruhi. Data penelitian ini meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah penduduk Miskin secara *time series* pada website resmi milik Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan data Kabupaten Lamongan secara *time series* dari tahun 2010-2022. Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Lamongan serta menerapkan kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang dapat mendukung penurunan jumlah penduduk miskin secara maksimal sehingga kesejahteraan manusia semakin meningkat dan merata.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu mampu memberi ilmu pengetahuan mengenai penurunan jumlah penduduk miskin yang ada pada suatu daerah khususnya Kabupaten Lamongan sehingga bisa dijadikan pedoman dalam penelitian berikutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Untuk para pengambil kebijakan, Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan penting dalam pembuatan kebijakan atau program mengenai penurunan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan.
- b) Bagi penulis, hasil yang diperoleh dari penelitian ini sebagai saran penerapan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan tentang Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lamongan.
- c) Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini memberi bahan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian serta sebagai perbandingan penelitian selanjutnya.